JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 10878-10891
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI KOPERASI UNIT DESA SAWIT KOTO BESAR PADANG BUNGUR BONJOL (KUD KOSKOPABO) KABUPATEN DHARMASRAYA

Dinni Gusti Moerista[1], Arnal Yanuardi[2], Donna Ikranova Febrina[3]
[1,2,3] STIA LPPN Padang, Indonesia

Email: dnnimoersta@gmil.com

Check for updates OPEN ACCESS

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3621

Sections Info
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 28 October 2026

Keywords:
Program Implementation
Farmer Empowerment
Village Unit Cooperative
Resources
Design-Reality Gap

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Farmer Economic Empowerment Program in the Plantation Unit of KUD Koskopabo, Dharmasraya Regency, and identifies barriers affecting its implementation. A descriptive qualitative approach was employed with seven purposively selected informants consisting of the cooperative chairman, secretary, and five members. Data were collected through semi-structured interviews, passive participatory observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that program implementation has been supported by communication, available resources, implementer disposition, and organizational structure, although service effectiveness remains uneven. Communication among implementers and commitment to the program support implementation, while limited resources constitute the main constraint. Only six officers are available compared with an estimated requirement of eleven, accompanied by shortages of fertilizer, seedlings, storage facilities, and operational vehicles. Other barriers include service design, operational capacity, monitoring, evaluation, transparency, and member participation. The study contributes by combining Edwards III's implementation dimensions with the design-reality gap perspective to provide a more comprehensive explanation of implementation and organizational constraints within a rural cooperative and identify areas requiring improvement in future program implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Petani pada Unit Kebun KUD Koskopabo Kabupaten Dharmasraya serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuh informan yang dipilih dengan teknik purposive, terdiri atas ketua koperasi, sekretaris, dan lima anggota dari koperasi. Data dikumpulkan melalui tahapan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah didukung oleh komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi, meskipun efektivitas pelayanan masih belum merata. Komunikasi antar pelaksana dan komitmen terhadap program mendukung pelaksanaan, sedangkan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Hanya enam petugas yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperkirakan sebanyak sebelas orang, disertai kekurangan pupuk, bibit, fasilitas penyimpanan, dan kendaraan operasional. Hambatan lainnya meliputi desain pelayanan, kapasitas operasional, evaluasi, transparansi, dan partisipasi anggota. Penelitian ini berkontribusi dengan menggabungkan dimensi implementasi Edwards III dan perspektif design-reality gap untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kendala implementasi dan organisasi dalam koperasi perdesaan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program selanjutnya.

Kata kunci: *Implementasi Program, Pemberdayaan Petani, Koperasi Unit Desa*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu bidang penting dalam menopang perekonomian masyarakat perdesaan karena berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan, dan keberlanjutan usaha rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, petani masih menghadapi berbagai persoalan, seperti perubahan harga komoditas, keterbatasan modal, ketersediaan sarana produksi, akses informasi, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya membutuhkan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dukungan kelembagaan dan program yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi petani. Dukungan input, pengelolaan usaha, akses informasi, dan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian (Rahim, 2007; Soekartawi, 2002). Sipayung et al. (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan petani juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga program pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu kelembagaan ekonomi yang dapat menyediakan pelayanan secara kolektif kepada masyarakat perdesaan. Koperasi dapat memberikan akses permodalan, menyediakan sarana produksi, menyampaikan informasi, memberikan pendampingan, serta membantu pemasaran hasil pertanian. Fungsi tersebut menempatkan koperasi sebagai usaha bersama yang bertumpu pada asas kebersamaan dan kebutuhan anggota (Subandi, 2015; Anoraga & Widiyanti, 2007). Dalam kegiatan ekonomi pertanian, keberadaan kelembagaan menjadi semakin penting karena petani berhubungan dengan berbagai pihak dalam memperoleh input, mengelola produksi, dan memasarkan hasil. Wirda et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola rantai nilai pertanian melibatkan hubungan antara berbagai aktor, termasuk petani dan kelembagaan ekonomi. Aisyah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tata kelola membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan hubungan antaraktor agar kegiatan dalam rantai nilai dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, KUD tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pelayanan, tetapi juga sebagai kelembagaan yang menghubungkan kebutuhan anggota dengan sumber daya dan aktor yang mendukung kegiatan pertanian.

Program pemberdayaan ekonomi diperlukan agar petani tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola kebutuhan usahanya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui penyediaan informasi, sarana produksi, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan. Penelitian Umar dan Sibua (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan petani berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan peluang kesejahteraan. Sipayung et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan program pemberdayaan petani membutuhkan proses perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, serta dukungan kapasitas kelembagaan. Sipayung et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan petani melalui program pembangunan dapat diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Rofi (2021) menunjukkan bahwa program yang dibangun melalui kerja sama dan penciptaan manfaat bersama dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi petani perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan, keterlibatan, dan manfaat ekonomi bagi petani.

Keberhasilan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan program. Petugas atau pendamping memiliki peran dalam memberikan informasi, membantu menyelesaikan permasalahan, serta menghubungkan petani dengan

sarana dan sumber daya yang dibutuhkan. Sugiarto et al. (2025) menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh berkaitan dengan kemampuan dalam mendukung pemberdayaan peternak, termasuk melalui pendampingan, pemecahan masalah, dan dukungan terhadap kebutuhan usaha. Dengan demikian, keberadaan sumber daya manusia dalam program pemberdayaan tidak hanya dilihat dari jumlah petugas yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada penerima program. Kondisi ini menjadi penting dalam melihat implementasi Program Unit Kebun karena luasnya cakupan anggota membutuhkan tenaga pelaksana yang cukup dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Selain sumber daya manusia, komunikasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Informasi mengenai program, jadwal kegiatan, ketersediaan sarana produksi, prosedur pelayanan, dan hak serta kewajiban anggota perlu disampaikan secara jelas dan merata. Anggreany et al. (2025) menunjukkan bahwa jaringan komunikasi dan keterlibatan stakeholder memiliki peran dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Komunikasi yang baik dapat membantu membangun koordinasi antaraktor, memperluas akses informasi, serta meningkatkan keterlibatan petani dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, keberadaan rapat, sosialisasi, penyuluhan, dan komunikasi langsung belum dapat dikatakan efektif apabila masih terdapat anggota yang terlambat menerima informasi atau belum memahami informasi program secara sama.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji pada KUD Koskopabo Kabupaten Dharmasraya. Data internal koperasi menunjukkan bahwa jumlah anggota mencapai 1.297 orang yang tersebar di Koto Besar, Bonjol II, Bonjol, dan Padang Bungur. Program Unit Kebun mencakup pelayanan pupuk, bibit, pengelolaan kebun, dan pendampingan anggota. Jumlah anggota dan luas wilayah pelayanan tersebut membuat kebutuhan komunikasi, distribusi, administrasi, pendampingan, serta koordinasi menjadi relatif besar (KUD Koskopabo, 2026). Dalam kondisi seperti ini, tata kelola organisasi menjadi penting agar pelayanan kepada anggota dapat dilaksanakan secara terarah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wirda et al. (2025) dan Aisyah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola dan koordinasi antaraktor menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi pertanian.

Tabel 1. Data Kondisi Program Unit Kebun yang Menunjukkan Permasalahan Penelitian

Aspek kondisi	Data	Penjelasan
Cakupan anggota	1.297 anggota pada 4 wilayah kerja	Cakupan pelayanan luas dan membutuhkan koordinasi
Komunikasi	7 sosialisasi; kehadiran 86,0%–90,0%	Saluran komunikasi tersedia, tetapi pemerataan informasi belum optimal
SDM pelayanan	6 petugas tersedia dari kebutuhan 11 orang	Terdapat kekurangan 5 petugas
Sarana dan input	NPK kurang 18 ton; organik 20 ton; bibit 600 batang; gudang dan kendaraan masing-masing kurang 1 unit	Kapasitas sumber daya belum seimbang dengan kebutuhan program

Sumber: Data internal KUD Koskopabo dan hasil penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa permasalahan penelitian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan program, tetapi juga dengan kapasitas program dalam menjangkau anggota secara merata. Cakupan 1.297 anggota pada empat wilayah, kekurangan lima petugas, serta keterbatasan pupuk, bibit, gudang, dan kendaraan menunjukkan adanya tekanan pada kapasitas pelayanan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kebutuhan program dengan sumber daya yang tersedia. Sugiarto et al. (2025)

menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung proses pemberdayaan, sedangkan Sipayung et al. (2021) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan diperlukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Data tersebut menjadi alasan empiris mengapa implementasi Program Unit Kebun perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi (KUD Koskopabo, 2026; Winarno, 2002; Grindle, 1980).

Pelaksanaan program telah didukung oleh kegiatan komunikasi melalui rapat anggota, penyuluhan, pertemuan kelompok tani, dan penyampaian langsung. Selama 2025 terdapat tujuh kegiatan sosialisasi dengan tingkat kehadiran antara 86,0% dan 90,0%. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi belum selalu diterima anggota pada waktu dan tingkat pemahaman yang sama. Anggreany et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi antarstakeholder merupakan bagian penting dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Dalam konteks Program Unit Kebun, komunikasi tidak hanya diperlukan antara pengurus dan petugas, tetapi juga antara koperasi, kelompok tani, dan anggota yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam model Edwards III, komunikasi menjadi unsur penting karena transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi memengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program (Winarno, 2002). Oleh karena itu, persoalan komunikasi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari pemerataan, kejelasan, dan ketepatan waktu informasi yang diterima anggota.

Persoalan yang lebih nyata terdapat pada sumber daya. Unit Kebun, administrasi, dan pendamping lapangan secara keseluruhan hanya memiliki enam petugas dari kebutuhan sebelas orang. Selain itu, terdapat kekurangan pupuk NPK sebesar 18 ton, pupuk organik 20 ton, bibit kelapa sawit 600 batang, serta masing-masing satu unit gudang dan kendaraan operasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas pelayanan dan kebutuhan program (KUD Koskopabo, 2026). Sugiarto et al. (2025) menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pendampingan merupakan bagian penting dalam mendukung pemberdayaan. Sementara itu, Sipayung et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan keterlibatan masyarakat dalam program. Dengan demikian, keterbatasan tenaga dan sarana produksi dalam Program Unit Kebun dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota secara optimal.

Pada sisi lain, pengurus dan petugas menunjukkan sikap terbuka, bersedia membantu anggota, dan tetap menjalankan program ketika menghadapi kendala. Pembagian tugas juga telah tersedia, meskipun pemahaman anggota terhadap prosedur, evaluasi, dan pelibatan anggota belum merata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa disposisi pelaksana dan struktur organisasi telah menjadi unsur pendukung, tetapi masih membutuhkan penguatan tata kelola. Sapar dan Harahap (2025) menunjukkan pentingnya perilaku dan komitmen dalam organisasi dalam mendukung kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi petani. Dalam konteks penelitian ini, sikap terbuka dan kesediaan petugas membantu anggota menjadi faktor pendukung, tetapi perlu didukung oleh pembagian tugas yang jelas, ketersediaan sumber daya, koordinasi, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kondisi program juga memperlihatkan adanya jarak antara rancangan dan kenyataan. Kebutuhan pupuk dan bibit tidak selalu dapat dipenuhi pada waktu yang diharapkan, sedangkan kapasitas tenaga dan fasilitas belum seimbang dengan cakupan pelayanan. Sipayung et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan program pemberdayaan membutuhkan kesesuaian antara perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Apabila

rancangan program tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia, maka pelaksanaan dapat menghadapi berbagai kendala. Dalam perspektif *design-reality gap*, kesenjangan antara desain program dan realitas pelaksanaan dapat muncul pada rancangan pelayanan, kemampuan pelaksana, sumber daya, serta sistem organisasi (Heeks, 2002). Perspektif tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kesenjangan antara kebutuhan dan rancangan Program Unit Kebun dengan kondisi nyata yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Tata kelola hubungan antara koperasi dan anggota juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. KUD sebagai kelembagaan ekonomi tidak hanya mengatur pembagian tugas internal, tetapi juga harus membangun hubungan dengan anggota sebagai penerima pelayanan. Wirda et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola dalam kegiatan pertanian berkaitan dengan hubungan dan koordinasi antaraktor dalam rantai nilai. Aisyah et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam membangun tata kelola yang mendukung kegiatan ekonomi pertanian. Dalam konteks KUD Koskopabo, hubungan tersebut dapat dilihat melalui penyampaian informasi, pelayanan sarana produksi, pendampingan, koordinasi kegiatan, serta keterlibatan anggota dalam program. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Program Unit Kebun tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga oleh kemampuan koperasi membangun koordinasi dan hubungan yang baik dengan anggota.

Program pemberdayaan juga perlu dilihat dari manfaat yang dihasilkan bagi anggota. Rofi (2021) menunjukkan bahwa program yang mengembangkan manfaat bersama dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui hubungan kemitraan dan pengelolaan program yang melibatkan berbagai pihak. Dalam penelitian ini, manfaat program tidak hanya dilihat dari tersedianya pupuk, bibit, atau pendampingan, tetapi juga dari kemampuan program dalam membantu anggota memenuhi kebutuhan usaha perkebunan. Dengan demikian, implementasi program perlu dianalisis dengan memperhatikan proses pelayanan sekaligus kesesuaian manfaat program dengan kebutuhan anggota.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Petani pada Unit Kebun KUD Koskopabo dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Implementasi dianalisis melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi berdasarkan model Edwards III, sedangkan hambatan dibaca melalui perspektif *design-reality gap* Heeks. Penggunaan kedua perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesesuaian antara rancangan program dengan kondisi pelaksanaannya. Penelitian ini juga menempatkan komunikasi, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, tata kelola organisasi, dan keterlibatan anggota sebagai bagian penting dalam memahami pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi petani pada Unit Kebun KUD Koskopabo.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Koskopabo, Nagari Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, selama empat bulan dari Februari sampai Mei 2026. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami proses pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Petani pada Unit Kebun dan hambatan yang muncul dalam pelayanan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, proses, interaksi, dan kondisi organisasi sebagaimana terjadi di lapangan (Sugiyono, 2012).

Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dengan

program. Informan berjumlah tujuh orang, terdiri atas Ketua KUD Koskopabo, Sekretaris KUD Koskopabo, dan lima anggota koperasi. Komposisi tersebut memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari pihak pelaksana dan penerima pelayanan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi yang meliputi data keanggotaan, program kerja, laporan kegiatan, serta dokumentasi kegiatan penelitian (Sugiyono, 2016).

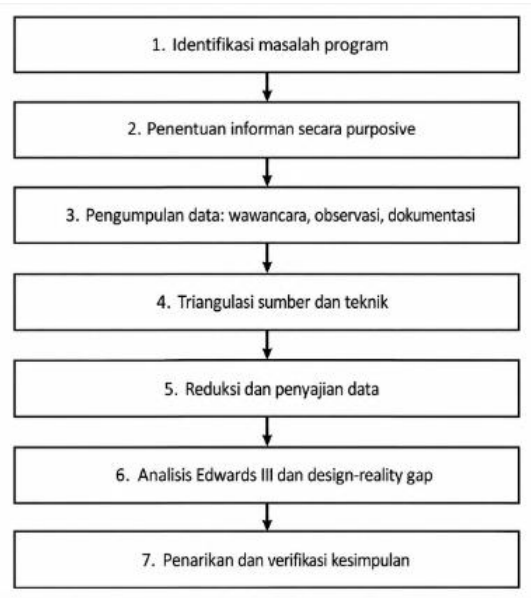
Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Kedudukan	Status Informan
1	Ketua KUD Koskopabo	Pengurus	Informan kunci
2	Sekretaris KUD Koskopabo	Pengurus	Informan kunci
3	Anggota 1	Anggota koperasi	Informan utama
4	Anggota 2	Anggota koperasi	Informan utama
5	Anggota 3	Anggota koperasi	Informan utama
6	Anggota 4	Anggota koperasi	Informan utama
7	Anggota 5	Anggota koperasi	Informan utama

Sumber: Data penelitian, 2026.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi dengan membandingkan keterangan antar-informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen penelitian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Selanjutnya, implementasi dianalisis melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, sedangkan faktor penghambat dikelompokkan melalui perspektif design-reality gap yang mencakup kesenjangan desain, pelaksanaan, dan sistem organisasi (Sugiyono, 2016; Heeks, 2002).

Alur penelitian pada Gambar 1 menunjukkan tahapan penelitian sejak identifikasi masalah, penentuan informan, pengumpulan dan pemeriksaan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Alur tersebut memastikan bahwa temuan tidak hanya bersumber dari satu teknik pengumpulan data, tetapi diperiksa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

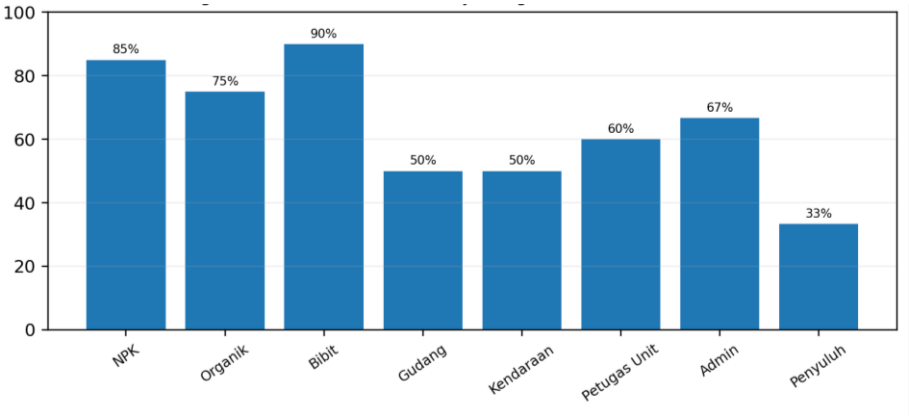
Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Petani pada Unit Kebun KUD Koskopabo telah berjalan, tetapi pemerataan pelayanan belum optimal. Ringkasan temuan pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa komunikasi, disposisi, dan struktur organisasi telah mendukung pelaksanaan program, sedangkan sumber daya merupakan kendala yang paling menonjol. Hambatan juga muncul pada kesesuaian rancangan pelayanan, kapasitas operasional, pengawasan, evaluasi, transparansi, dan keterlibatan anggota (KUD Koskopabo, 2026; Grindle, 1980; Heeks, 2002).

Tabel 3. Implementasi Program Unit Kebun

Indikator	Data Utama	Makna Temuan
Komunikasi	7 kegiatan sosialisasi; kehadiran 86-90%; informasi melalui rapat, penyuluhan, kelompok tani, dan komunikasi langsung.	Saluran komunikasi tersedia, tetapi pemerataan dan ketepatan informasi masih perlu diperkuat.
Sumber daya	6 petugas dari kebutuhan 11; NPK kurang 18 ton; pupuk organik kurang 20 ton; bibit kurang 600 batang; gudang dan kendaraan masing-masing kurang 1 unit.	Kapasitas pelayanan belum seimbang dengan kebutuhan anggota dan wilayah pelayanan.
Disposisi	Petugas dinilai terbuka, bersedia menjelaskan, membantu anggota, dan tetap menjalankan program ketika terjadi kendala.	Komitmen pelaksana menjadi aspek yang mendukung keberlangsungan pelayanan.
Struktur organisasi	Pembagian tugas dan koordinasi berjalan; prosedur tersedia, tetapi pemahaman SOP, evaluasi, dan pelibatan anggota belum merata.	Struktur mendukung operasi, namun evaluasi dan partisipasi anggota masih perlu diperkuat.

Sumber: Data internal KUD Koskopabo dan hasil penelitian, 2026.



Gambar 2. Tingkat Ketersediaan Sumber Daya terhadap Kebutuhan Program Unit Kebun
Sumber: Data internal KUD Koskopabo, 2026, diolah.



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Penelitian di KUD Koskopabo
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026.

Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Petani dilakukan melalui beberapa saluran, yaitu rapat anggota, penyuluhan, pertemuan kelompok tani, dan penyampaian informasi secara langsung. Sepanjang tahun 2025 tercatat tujuh kegiatan sosialisasi dengan tingkat kehadiran sekitar 86 sampai 90 persen. Materi yang disampaikan meliputi program kerja, teknik pemupukan, distribusi pupuk subsidi, bantuan sarana produksi, pengendalian hama, serta evaluasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KUD Koskopabo telah menyediakan ruang komunikasi bagi anggota untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Unit Kebun. Temuan ini sejalan dengan Anggreany et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komunikasi dan keterlibatan dalam jaringan komunikasi berperan dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani.

Meskipun saluran komunikasi telah tersedia, penyampaian informasi belum diterima seluruh anggota pada waktu yang sama. Anggota yang aktif mengikuti rapat atau tinggal dekat dengan kantor koperasi cenderung memperoleh informasi lebih cepat dibandingkan anggota yang tinggal jauh atau tidak hadir dalam pertemuan. Informasi tertentu memang dapat diteruskan melalui ketua kelompok maupun telepon, tetapi penggunaannya masih menyesuaikan kebutuhan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan komunikasi masih perlu diperhatikan agar informasi penting tidak hanya lebih cepat diterima oleh anggota yang aktif mengikuti kegiatan koperasi. Temuan ini sesuai dengan Sipayung et al. (2021) yang menunjukkan pentingnya pengelolaan dan penyampaian informasi dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan petani.

Perbedaan juga terlihat pada tingkat pemahaman anggota terhadap aturan dan prosedur pelayanan. Anggota yang sering menggunakan layanan cenderung lebih memahami alur program, sedangkan anggota yang jarang datang masih membutuhkan penjelasan tambahan dari pengurus. Pengurus telah berusaha memberikan penjelasan ketika anggota mengalami kesulitan, tetapi informasi yang diterima belum selalu memiliki tingkat kelengkapan yang sama. Dengan demikian, komunikasi program sudah berjalan, namun pemerataan informasi, ketepatan waktu penyampaian, dan konsistensi penjelasan masih perlu diperkuat agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai program. Kondisi tersebut sejalan dengan Sugiarto et al. (2025) yang menekankan pentingnya kemampuan penyuluh

dalam memberikan informasi dan membantu petani mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu bagian yang masih terbatas dalam pelaksanaan Program Unit Kebun. Jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan, yaitu tiga petugas Unit Kebun dari kebutuhan lima orang, dua petugas administrasi dari kebutuhan tiga orang, dan satu penyuluh lapangan dari kebutuhan tiga orang. Secara keseluruhan, KUD hanya memiliki enam petugas dari kebutuhan sebelas orang. Kekurangan lima petugas menyebabkan beberapa pekerjaan harus dilakukan secara bergantian, terutama ketika permintaan pelayanan dari anggota meningkat dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat menjadi kendala dalam mendukung pemberdayaan petani. Hal ini sejalan dengan Sugiarto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kompetensi dan kapasitas penyuluh menjadi bagian penting dalam mendukung pemberdayaan petani.

Keterbatasan sumber daya juga terlihat pada ketersediaan sarana produksi. Pupuk NPK tersedia sebanyak 102 ton dari kebutuhan 120 ton sehingga masih terdapat kekurangan 18 ton. Pupuk organik tersedia 60 ton dari kebutuhan 80 ton, sedangkan bibit kelapa sawit tersedia sebanyak 5.400 batang dari kebutuhan 6.000 batang. Selain itu, gudang penyimpanan dan kendaraan operasional masing-masing hanya tersedia satu unit dari kebutuhan dua unit. Data tersebut memperlihatkan bahwa program tetap dapat dijalankan, tetapi kapasitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anggota. Kondisi ini sejalan dengan Sapar dan Harahap (2025) yang menunjukkan bahwa dukungan anggaran dan sumber daya pertanian memiliki hubungan dengan pengelolaan kegiatan pertanian dan kondisi ekonomi petani.

Keterbatasan tenaga dan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap proses pelayanan, terutama ketika permintaan pupuk, bibit, administrasi, dan pendampingan meningkat secara bersamaan. Petugas harus melakukan pemeriksaan permintaan, pencatatan administrasi, penyiapan barang, dan pengaturan distribusi dengan jumlah tenaga yang terbatas. Keterlambatan pasokan dari distributor juga dapat menambah waktu tunggu anggota. Oleh karena itu, persoalan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah petugas atau ketersediaan barang, tetapi juga berpengaruh terhadap kecepatan dan pemerataan pelayanan yang diterima anggota Program Unit Kebun. Hal ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Rofi (2021) yang menunjukkan bahwa dukungan berupa bibit dan sarana produksi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program yang ditujukan kepada petani.

Disposisi

Disposisi pelaksana menunjukkan sikap yang relatif mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Petani. Berdasarkan keterangan informan, pengurus dan petugas tetap memberikan pelayanan kepada anggota sesuai kebutuhan serta membantu ketika ditemukan permasalahan pada Unit Kebun. Anggota juga menggambarkan petugas sebagai pihak yang cukup ramah, terbuka, dan bersedia memberikan penjelasan mengenai prosedur yang belum dipahami. Sikap tersebut membantu menjaga hubungan antara koperasi dan anggota selama proses pelayanan berlangsung. Kondisi ini sejalan dengan Sapar dan Harahap (2025) yang menunjukkan bahwa perilaku organisasi dan dukungan pelaksana memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kegiatan pertanian dan peningkatan ekonomi petani.

Komitmen pelaksana juga terlihat ketika terjadi keterlambatan pasokan pupuk maupun

peningkatan kebutuhan anggota. Dalam kondisi tersebut, pengurus tetap berusaha mencari penyelesaian, menjelaskan keadaan yang terjadi, dan memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan kemampuan koperasi. Meskipun demikian, anggota masih mengharapkan agar pelaksanaan program dapat lebih konsisten dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana telah menjadi bagian yang mendukung program, tetapi hasil pelayanan tetap berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan kondisi operasional lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan Aisyah et al. (2025) yang menjelaskan bahwa kerja sama antaraktor diperlukan untuk membentuk sistem pengelolaan dan pengendalian dalam suatu rantai kegiatan ekonomi.

Hasil pengamatan juga memperlihatkan bahwa pelayanan petugas tidak hanya terbatas pada penyelesaian administrasi. Petugas memberikan penjelasan dan membantu anggota menentukan langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala dalam memperoleh pelayanan. Pada saat jumlah anggota yang datang meningkat, waktu tunggu memang dapat bertambah, tetapi sikap petugas tetap dinilai cukup baik. Dengan demikian, disposisi menjadi salah satu bagian yang mendukung implementasi program karena adanya kemauan membantu, keterbukaan, dan tanggung jawab pelaksana dalam mempertahankan pelayanan kepada anggota. Temuan tersebut sejalan dengan Sipayung et al. (2023) yang menempatkan keterlibatan pelaksana dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemberdayaan petani melalui program pembangunan desa.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam pelaksanaan Program Unit Kebun telah didukung oleh pembagian tugas antar-pengurus. Setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing, sedangkan administrasi program dilaksanakan mengikuti aturan internal koperasi agar data anggota dan kebutuhan pelayanan dapat tercatat. Koordinasi dilakukan melalui rapat pengurus dan rapat anggota ketika terdapat persoalan yang perlu dibahas bersama. Pembagian tersebut memberikan dasar yang cukup jelas bagi pengurus dan petugas dalam menjalankan kegiatan Program Unit Kebun. Kondisi tersebut sejalan dengan Wirda et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kegiatan pertanian melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda dalam suatu rantai nilai dan membutuhkan tata kelola antarpelaku.

Walaupun pembagian tugas telah dipahami oleh pengurus, pemahaman anggota terhadap prosedur dan standar operasional belum sepenuhnya merata. Anggota yang baru bergabung atau jarang menggunakan layanan masih membutuhkan arahan mengenai bagian yang harus dituju maupun dokumen yang perlu disiapkan. Dalam kondisi tersebut, pengurus biasanya memberikan penjelasan secara langsung agar anggota dapat mengikuti tahapan pelayanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa prosedur kerja telah tersedia, tetapi penyampaian dan pemahaman SOP kepada seluruh anggota masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut sejalan dengan Aisyah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola membutuhkan aturan dan pengaturan hubungan antarpelaku agar setiap pihak dapat menjalankan perannya dalam kegiatan ekonomi.

Pengawasan dan evaluasi program juga masih lebih banyak dilakukan secara internal melalui rapat pengurus dan pengecekan kondisi di lapangan. Anggota telah memiliki kesempatan menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka alami, tetapi keterlibatan mereka dalam proses evaluasi belum dilakukan secara terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi telah mendukung kegiatan operasional program, namun masih diperlukan penguatan pada sosialisasi SOP, mekanisme evaluasi, dan keterlibatan anggota. Dengan cara tersebut, struktur organisasi tidak hanya berfungsi dalam

pembagian pekerjaan, tetapi juga dapat mendukung pelayanan dan evaluasi program secara lebih terbuka. Temuan ini sejalan dengan Sipayung et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan program pemberdayaan petani membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan kelembagaan yang mendukung keterlibatan masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Program

Pada kesenjangan desain, program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk, bibit, dan pelayanan kebun, tetapi variasi kebutuhan anggota belum selalu terakomodasi. Anggota memiliki perbedaan lokasi, waktu kebutuhan, serta pemahaman administrasi sehingga pola pelayanan yang sama belum selalu memberikan pengalaman yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa rancangan program perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran. Sipayung et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan diperlukan agar program dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani. Dengan demikian, hambatan pada aspek desain dalam penelitian ini berkaitan dengan belum optimalnya penyesuaian rancangan pelayanan terhadap kondisi anggota. (Data penelitian, 2026; Heeks, 2002).

Pada kesenjangan pelaksanaan, hambatan muncul pada distribusi sarana produksi, jumlah tenaga, fasilitas, dan ketepatan jadwal. Keterlambatan pupuk dari distributor membuat stok tidak selalu tersedia pada musim pemupukan. Gudang dan kendaraan yang terbatas juga menyebabkan penyimpanan serta distribusi harus disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia. Program tetap dilaksanakan, tetapi sebagian kegiatan dapat bergeser karena menunggu stok, kendaraan, atau kesiapan petugas. Sugiarto et al. (2025) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, kompetensi penyuluh, dan pendampingan merupakan bagian penting dalam mendukung pemberdayaan petani. Dengan demikian, keterbatasan tenaga dan fasilitas dalam penelitian ini menjadi salah satu hambatan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program. (Data penelitian, 2026; Heeks, 2002).

Pada kesenjangan sistem, pengawasan dan evaluasi telah dilakukan melalui rapat serta pengecekan lapangan, tetapi masih didominasi pengurus. Partisipasi anggota dalam evaluasi belum terstruktur, sementara informasi mengenai pengelolaan program dan pembagian manfaat belum dipahami secara merata. Anggreany et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan berperan dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem implementasi membutuhkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur agar anggota dapat terlibat dalam proses evaluasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan transparansi, evaluasi berkala, dan mekanisme umpan balik agar pengawasan tidak hanya berpusat pada pengurus. (Data penelitian, 2026; Heeks, 2002).

Pembahasan

1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Petani pada Unit Kebun

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Unit Kebun dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Kondisi tersebut sesuai dengan model Edwards III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh keempat unsur tersebut (Winarno, 2002). KUD telah memiliki saluran komunikasi, pembagian tugas, dan pelaksana yang berkomitmen, tetapi keterbatasan tenaga, sarana produksi, gudang, dan kendaraan masih membatasi pelayanan kepada 1.297 anggota yang tersebar di empat wilayah (KUD Koskopabo, 2026).

Dari sisi komunikasi, sosialisasi, rapat, dan penyampaian langsung telah dilakukan, tetapi

informasi belum selalu diterima anggota secara merata. Hal ini sejalan dengan Anggreany et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi berperan penting dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Dari sisi sumber daya, enam petugas yang tersedia dari kebutuhan sebelas orang menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas pelayanan. Sugiarto et al. (2025) juga menegaskan pentingnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha pertanian. Sementara itu, sikap terbuka dan kemauan membantu anggota menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung, meskipun masih perlu diperkuat dengan evaluasi dan pelibatan anggota secara lebih teratur.

Dengan demikian, implementasi Program Unit Kebun telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Penguatan program terutama diperlukan pada pemerataan komunikasi, penambahan dan peningkatan kapasitas petugas, pemenuhan sarana produksi, serta peningkatan keterlibatan anggota dalam evaluasi program.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Unit Kebun

Faktor penghambat utama terlihat dari adanya kesenjangan antara rancangan program dan kondisi nyata di lapangan. Program telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pupuk, bibit, dan pelayanan kebun, tetapi ketersediaannya belum selalu sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diperlukan anggota. Jumlah anggota yang besar dan tersebar di empat wilayah juga membuat pelayanan membutuhkan sumber daya dan koordinasi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *design-reality gap*, yaitu kesenjangan antara kondisi yang direncanakan dengan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan program (Heeks, 2002).

Hambatan lainnya adalah keterbatasan tenaga, sarana produksi, gudang, kendaraan, serta keterlambatan pasokan dari distributor. Kondisi tersebut memengaruhi ketepatan waktu pelayanan kepada anggota. Selain itu, sistem evaluasi dan keterlibatan anggota belum berjalan secara optimal. Sipayung et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam pemberdayaan petani. Oleh karena itu, hambatan implementasi Program Unit Kebun perlu diatasi melalui perbaikan perencanaan, penguatan sumber daya dan sarana, peningkatan koordinasi, serta pelibatan anggota dalam evaluasi.

Secara keseluruhan, faktor penghambat implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya dapat memperlambat pelayanan, komunikasi yang belum merata dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, sedangkan evaluasi yang belum partisipatif dapat menyebabkan permasalahan berulang. Karena itu, perbaikan program perlu dilakukan secara terpadu agar pelaksanaan Program Unit Kebun lebih sesuai dengan kebutuhan anggota dan tujuan pemberdayaan ekonomi petani.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Petani pada Unit Kebun KUD Koskopabo telah berjalan dengan dukungan komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi, tetapi pemerataan pelayanan kepada anggota belum sepenuhnya tercapai. Kendala utama terdapat pada keterbatasan sumber daya, yaitu 6 petugas dari kebutuhan 11 orang, kekurangan 18ton pupuk NPK, 20ton pupuk organik, 600 batang bibit, serta keterbatasan gudang dan kendaraan operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan program tidak hanya dipengaruhi komitmen pelaksana, tetapi juga kesesuaian kapasitas pelayanan dengan kebutuhan anggota. Implikasinya, perbaikan program perlu diarahkan pada penambahan tenaga, penguatan perencanaan sarana produksi,

pemerataan komunikasi, kejelasan SOP, serta evaluasi yang melibatkan anggota secara lebih terstruktur. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus kajian terhadap kondisi implementasi berdasarkan data penelitian tahun 2026, sehingga belum menggambarkan perkembangan program dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal dan melibatkan lebih banyak anggota untuk mengkaji perubahan kualitas pelayanan, pemerataan manfaat, serta keberlanjutan Program Unit Kebun.

REFERENSI

Aisyah, N. S., Rachmina, D., & Winandi, R. (2025). Tata kelola (governance) kopi Arabika spesial dalam rantai nilai. *Jurnal Agribisnis Indonesia, 13*(1), 119–128. https://doi.org/10.29244/jai.2025.13.1.119-128

Anggreany, S., Sumardjo, Lubis, D. P., & Syahyuti. (2025). The role of stakeholders in strengthening communication networks to foster farmers' economic institutions. *Jurnal Penyuluhan Pertanian, 20*(1), 58–78. https://doi.org/10.51852/rzdpjx51

Anoraga, P., & Widiyanti, N. (2007). *Dinamika koperasi*. Rineka Cipta.

Febriyana, F., et al. (2022). *Implementasi program kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Damai dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sei Mandian Kecamatan Kepenuhan*.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Hendar, & Kusnadi. (2005). *Ekonomi koperasi*. Lembaga Penerbit FE UI.

Heeks, R. (2002). Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations. *The Information Society, 18*(2), 101–112. https://doi.org/10.1080/01972240290075039

KUD Koskopabo. (2026). *Laporan tahunan perkembangan ekonomi dan produksi anggota KUD Sawit Koto Besar Padang Bungur Bonjol tahun 2023–2025*. KUD Koskopabo.

Launuru, M. I. (2019). *Implementasi program Koperasi Unit Desa (KUD) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hila Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah*.

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Implementasi dan evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.

Rahim, A. (2007). *Ekonomi pertanian*. Penebar Swadaya.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (1)*.

Republik Indonesia. (1984). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)*.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

Rofi, A. (2021). Program menciptakan manfaat bersama untuk meningkatkan pendapatan petani pisang di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. *Analisis Kebijakan Pertanian, 19*(2), 165–175. https://doi.org/10.21082/akp.v19n2.2021.165-175

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal, 8*(4), 538–560.

Sapar, S., & Harahap, B. (2025). The significance of organizational citizenship behavior (OCB) improving the farmer economy with government budget in agricultural sector. *Jurnal Penyuluhan Pertanian, 20*(2), 201–215. https://doi.org/10.51852/dx935v63

Sipayung, B. P., Fobia, T., Taena, W., & Joka, U. (2021). Model pengelolaan dana desa dan pemberdayaan petani di desa perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. *Analisis Kebijakan Pertanian, 19*(2), 135–148. https://doi.org/10.21082/akp.v19n2.2021.135-148

Sipayung, B. P., Joka, U., Maulana, A. S., & Onuigbo, D. M. (2023). Fiscal decentralization and farmer empowerment in Indonesia-Timor Leste border: A case study of village fund. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture, 38*(2), 273–283. https://doi.org/10.20961/-

carakatani.v38i2.67578
Soekartawi. (2002). *Analisis usaha tani*. UI Press.
Subandi. (2015). *Ekonomi koperasi*. Alfabeta.
Sugiarto, M., Wakhidati, Y. N., & Gandasari, D. (2025). Kompetensi penyuluh pertanian untuk pemberdayaan peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Penyuluhan, 21*(1), 182–195. https://doi.org/10.25015/21202552492
Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Sugiyono. (2016). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
Sumarsono, S. (2010). *Manajemen koperasi: Teori dan praktik*. Erlangga.
Umar, A., & Sibua, F. (2022). Pemberdayaan petani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8*(18), 420–429.
Winarno. (2002). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. PT Buku Kita.
Wirda, B., Nurmalina, R., & Muflikh, Y. N. (2025). Tata kelola rantai nilai kopi Arabika di Dataran Tinggi Gayo. *Jurnal Agribisnis Indonesia, 13*(1), 1–15. https://doi.org/10.29244-/jai.2025.13.1.1-15

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA